

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adjie, Habib, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

-----, 2011, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Rafika Aditama, Bandung.

-----, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung

Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Manullang, M, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Muhammad, AbdulKadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.Ke-1, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----,2014, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Ke IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mukti Fajar dan Yulanto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Saydam, Gouzali, 2003, *Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan*, Djambatan, Jakarta.

Siagian, Sondang. P, 2006, *Filsafat Administrasi*, Cetakan ketiga, PT. Bumi Aksara, Jakarta .

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Tesis:

Pambudi, Teguh, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Di Kota/Kabupaten Banyuwangi", *Tesis*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2009.

Triyoga, "Peranan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jambi Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Para Notaris Di Kabupaten Bungo", *Tesis*, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2012.

Nurdiana, Fitria, "Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Profesi Jabatan Notaris Di Kota Banjarmasin", *Tesis*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012.

Yuswan, Muhammad, "Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Konawe Selatan", *Tesis*, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2014.

Internet:

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hulu, “Sejarah”,
<http://www.rokanhulukab.go.id>, di akses pada tanggal 1 Oktober 2014.

Kementerian Hukum dan Ham RI Kantor Wilayah Riau, “Data Notaris 2014”,
<http://www.kumham-riau.info>, di akses pada tanggal 26 September 2014.

Ilham Fadhly,” Pengertian Pengawasan”, <http://iamfadhli.wordpress.com>, diakses
tanggal 23 september 2014.

Tatang.Manguni, “Metode Penelitian”, <http://www.tatangmanguny.wordpress.com>
diakses 30 September 2014.